

**TRANSPARANSI ANGGARAN DANA APBD DI KELURAHAN SAMATA  
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA TAHUN 2014  
( STUDI PEMBINAAN REMAJA )**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan politik**

**UIN Alauddin Makassar**

**Oleh**

**SYARIFUDDIN  
30600111087**

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN

NIM : 30600111087

Program Studi : Strata Satu (S1)

Judul : Transparansi Anggaran dana APBD di Kelurahan Samata  
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tahun 2014  
(Studi Pembinaan Remaja)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi penulis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan disuatu perguruan tinggi dan skripsi penulis ini asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Gowa, 19 September 2016

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A  
  
**SYARIFUDDIN**  
**NIM: 30600111087**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “(TRANSPARANSI ANGGARAN DANA APBD KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA TAHUN 2014)” yang disusun oleh SYARIFUDDIN, Nim: 30600111087, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 30 September 2016 M. bertepatan dengan 21 Safar 1436 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Filsafat dan Politik Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 16 Juli 2017 M  
27 Safar 1436 H

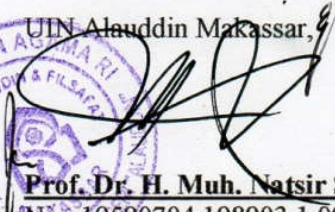
### DEWAN PENGUJI

Ketua .	: Dr. Tasmin Tangngareng M.ag	(.....)
Skertaris	: Syahrir Karim S.Ag, M.Si, P.hd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Abdullah Thalib M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Anggriani Alamnsya, S.Ip. M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Ismah Tita Ruslin, S.Ip, M.Si	(.....)


Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, M.A**  
Nip. 19590704 198903 1 003



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas berkat dialah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi untuk lebih menambah pengetahuan dan pengalaman di sebuah Universitas. Terima kasih atas nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kami Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tak henti- hentinya Allah SWT melimpahkan beragam nikmatnya dan dibawah bimbingan para pendidik sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Musafir Pababari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, parawakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, beserta parawakil Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

3. Kepada Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Politik, serta Syahrir Karim, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku sekretaris jurusan.
4. Kepada pembimbing skripsi Prof Dr.H.Muhammad Ramli,M.Si selaku Konsultan I dan Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si. selaku Konsultan II, yang selama bimbingan banyak memberi saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu mengarahkan penulis hingga tahap penyelesaian.
6. Kepada kedua Orang Tua Saya Nurdin Dg Rala dan Nurlinda Dg Ngona yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, Kasih sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya.
7. Terkhusus pula untuk teman-teman seperjuangan: Iman adli Aqil, Wisdariansyah, Nurhidayat, Rakuti, Tedi Putra, Rahmin, serta semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
8. Rekan- rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik terkhusus mahasiswa IPO. 1, 2, 3 dan 4 angkatan 2011 yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan- kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

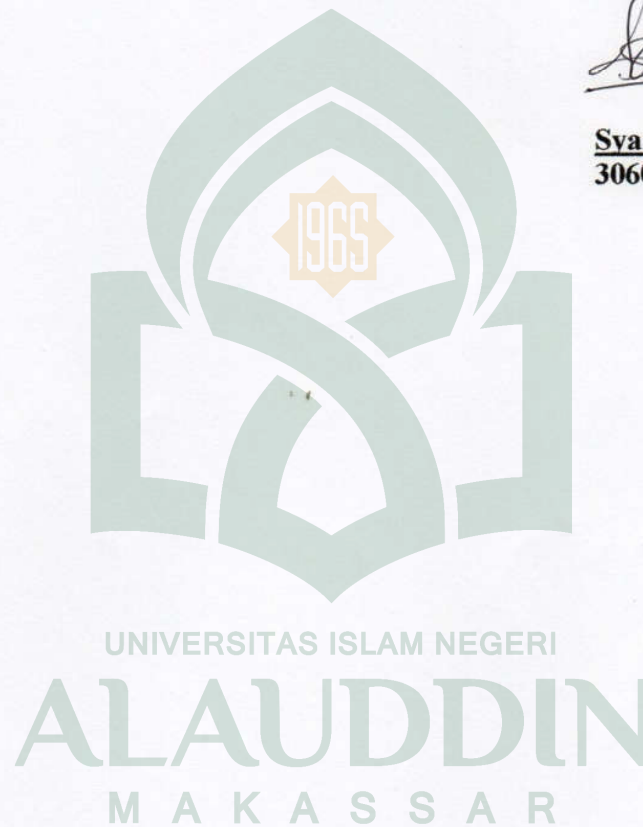


Kepada Allah SWT penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Samata, 21 September 2016



**Syarifuddin**  
**30600111087**



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Landasan Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	34
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	37
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GOWA .....	37
1. Letak Geografis .....	37
2. Jumlah Penduduk .....	39
3. Tingkat Pendidikan .....	42
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SOMBA OPU .....	42
a. Sejarah kecamatan somba opu .....	42
b. Profil Dan Keadaan Geografis .....	45
c. Jumlah Penduduk .....	48
d. Sosial Budaya .....	50

C. GAMBARAN UMUM KELURAHAN SAMATA.....	52
a. Letak Dan Geografis.....	52
b. Jumlah Penduduk.....	55
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Bentuk Transparansi Alokasi Dana Pembinaan Remaja.....	57
B. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana.....	69
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi.....	73
Daftar Pustaka .....	74





## ABSTRAK

**Nama : Syarifuddin**

**Nim : 30600111087**

**Jurusan : Ilmu Politik**

**Judul Skripsi : Transparansi Anggaran Dana APBD di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (*Studi Pembinaan Remaja*)**

---

Skripsi ini membahas mengenai Transparansi Anggaran Dana APBD di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2014. Teori yang digunakan dalam menguraikan masalah tersebut adalah teori Transparansi, Partisipasi Politik, Demokrasi, *Good Goernence*, yang merupakan bentuk pemerintahan yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan tujuan untuk menggambarkan Transparansi Alokasi dana APBD di kelurahan Samata dalam Program Pembinaan Remaja. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi pustaka (*Library Research*) dengan mengakumulasikan data yang diperoleh kemudian mengembangkannya dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menggambarkan Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa, Kurangnya penyediaan informasi yang jelas menjadi penghambat remaja untuk mengetahui berapa anggaran dana yang dialokasikan untuk pembinaan remaja kekelurahan, serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kelurahan Samata terhadap pengalokasian dana pembinaan remaja ke Masyarakat. Adapun minimnya akses informasi anggaran dana Kelurahan Samata menjadikan Kegiatan Remaja tidak terlaksana seperti apa yang telah di agendakan dari Kelurahan Samata karena Anggaran Dana yang teralokasikan Kekelurahan Remaja masih minim diketahui oleh Remaja.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***1. Latar Belakang***

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Pemberitahuan Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, Politik luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat propinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah

---

<sup>11</sup>Surtikanti, Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 11, No. 1, hal 16

dilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa: (1) pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang pertahanan keamanan, Politik Luar Negeri, peradilan dan Monitor/Fisikal, Agama serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya; (2) proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya.<sup>2</sup>

Hakekat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Desentralisasi *vis a vis* otonomi daerah tidak akan menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya sekedar dipindahkan ke daerah, bukan menguranginya. Demokrasi lokal seharusnya memenuhi beberapa aspek yaitu:

- a. Partisipasi dari masyarakat,
- b. Pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat,
- c. Dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas.

Desentralisasi tidak semata membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan dan menghasilkan kebijakan akan tetapi yang lebih penting adalah membangkitkan kompetensi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas, dan pemerintah lokal. Seperti ayat yang di bawah QS. AN NISA AYAT 59:

---

<sup>2</sup>Surtikanti, Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 11, No. 1, hal 16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

*Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan adil atas kekuasaan yang telah diberikan amanah kepadanya terhadap masyarakatnya karena pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt suatu saat nanti.

Pembangunan di Indonesia didorong dari adanya dinamika yang menuntut perubahan –perubahan disisi pemerintah maupun disisi warga ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di negara diharapkan menjadi lebih demokratis dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan harapan baru terhadap peran tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri. Warga seperti tersebut diatas berarti adanya perubahan dalam pola *Good Governance*

Seperti ayat yang di bawah Qs. An Nisa Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٦﴾

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa janganlah memberikan seorang kekuasaan jika tidak memiliki akal yang sempurna karena harta dalam masyarakat bisa dia jadikan sebagai pokok kehidupan.

*Governance* disini diartikan sebagai mekanisme praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Demokrasi adalah rakyat memerintah atau pemerintahan yang sering sekali dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian, demokrasi tersebut cenderung mengarah pada sistem pemerintahan agresif dan tidak stabil cenderung mengarah pada tirani. Menurut Robert A. Dahl, setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni: *pertama*, para pejabat yang dipilih. *Kedua*, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. *Keempat*,

akses informasi-informasi alternative. *Kelima*, otonomi asosiasi, yakni, warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relative bebas. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif.<sup>3</sup>

Parafilosuf seperti Plato sekalipun tidak terlalu antusias mendukung ide demokrasi karena sangat tidak mungkin menciptakan pemerintahan rakyat tanpa menimbulkan konflik. Plato kemungkinan besar berpendapat bahwa demokrasi melahirkan pemimpin dan yang dipimpin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan suatu impian belaka. Karena pada kenyataannya demokrasi hanya melahirkan segelintir orang mengatasnamakan seluruh rakyat. Legitimasi memerintah atas nama orang banyak tersebut ternyata akan melahirkan bentuk pemerintahan tirani ketimbang demokratis.

Penelitian ini tentang pertanggung jawaban Negara terhadap rakyatnya. Fokus penelitian tentang transparansi anggaran pembinaan remaja di Kelurahan Samata. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun<sup>4</sup>. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan ataupun kebenaran. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan

---

<sup>3</sup>A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hal 251.

<sup>4</sup>M.Saripuddin, *Hubungan Kenakalan Remaja dengan Fungsi Sosial Keluarga*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hal 26



orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Sedangkan untuk kegiatan remaja yang dianggap baik adalah seorang remaja yang mampu memberikan kegiatan hal-hal yang positif dan mampu berprestasi dalam bidang Olahraga, Seni, dan Keagamaan.

Hal ini memicu para remaja agar terlibat dalam kelompok Karang Taruna pembinaan remaja seperti di Kelurahan Samata. Program remaja di Kelurahan Samata yang sangat potensial untuk memberdayakan kalangan remaja seperti halnya dalam bidang olahraga, seni, dan keagamaan. Namun anggaran untuk kegiatan remaja yang telah dialokasikan ke Kelurahan Samata belum terasap dengan baik, program remaja belum terlaksana dengan maksimal di karenakan anggaran dana untuk kegiatan remaja masih cenderung tertutup.

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti dengan mengangkat judul skripsi Transparansi alokasi dana APBD Kelurahan Samata Kabupaten Gowa Tahun 2014 (Studi Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu).

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bentuk Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kelurahan samata dalam mewujudkan *Good Governance*
2. Memberikan Pendidikan Politik mengenai Transparansi dalam mewujudkan *Good Governance*

## **4. Tinjauan Pustaka**

Demi melengkapi referensi penulis dalam penulisan skripsi dengan judul Transparansi Alokasi Dana APBD Kelurahan Samata Kabupaten Gowa Dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi Program Pembinaan Remaja), Penulis menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “*Transparansi Penyaluran Raskin Di Kelurahan pattinggaloan Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*”, Oleh Hartuti<sup>5</sup>

Penelitian ini menjelkaskan transparansi penyaluran raskin di kelurahan pattinggaloan baru dengan menggunakan indicator pendataan, pendistribusian, penyaluran. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa ketiga indicator tersebut masih kurang maksimal disebabkan karena proses yang dilakukan masih ada sebagian masyarakat yang belum terdaftar dalam RTM, pendistribusian yang juga belum maksimal dan penyaluran yang belum merata dibagikan kepada masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapatkan beras miskin.

2. Skripsi yang berjudul “*Transparansi Pelayanan Pablik Di Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar*”, Oleh Irawati T.<sup>6</sup>

Penelitian ini mendapatkan bahwa buruknya kinerja pelayanan public selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakanya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu pelayanan public harus dilaksanakan secara transpoaran oleh setiap itu pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan public memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya pada pelaksanaan pelayanan public di Kelurahan Mario Kecamatan Mariso.

---

<sup>5</sup>Hartuti, *Transparansi Penyaluran Raskin Di Kelurahan pattinggaloan Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Makassar, Makassar, 2015.

<sup>6</sup>Irawati T, *Transparansi Pelayanan Pablik Di Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Makassar, Makassar, 2013.

Penelitian ini menunjukkan secara umum Transparansi Pelayanan Publik di Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikatornya yaitu meskipun lokasi pelayanan dan sarana prasarana yang digunakan sudah cukup memadai tetapi, manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrative pelayanan, rincian biaya pelayanan dan waktu penyelesaian yang tidak jelas, serta petugas pelayanan yang berwenang kurang bertanggung jawab sehingga cukup menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Berdasarkan dari factor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Pelayanan Publik di Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar menunjukkan factor cenderung dapat mendukung Transparansi pelayanan publik yaitu kerjasama pegawai yang baik serta etika pegawai yang cukup ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan. Faktor yang cenderung dapat menghambat transparansi pelayanan publik yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai serta kurangnya kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan yang terjadi.

3..Skripsi yang berjudul “*Transparansi Pemerintah dalam pelaksanaan Program pelayanan sertifikat tanah di kota Makassar*”, Oleh Risman Fadli.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya hak-hak atas tanah yang belum bersertifikat di Kota Makassar. Dikarenakan anggapan masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu sulit, lama dan biayanya sangat mahal. Hal ini

---

<sup>7</sup>Risman Fadli, *Transparansi Pemerintah dalam pelaksanaan Program pelayanan sertifikat tanah di kota Makassar*, Skripsi, , Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Makassar, Makassar, 2014.

diperparah dengan munculnya calo-calo yang beusaha mencari keuntungan denagn kondisi seperti ini. Oleh karena ityulah, pemerintah meluncurkan program inovatif dalam bidang pelayanan pertanahan yang dikenal dengan LARASITA(layanan rakyat untuk sertifikat tanah). Hal ini berdasarkan pada pendahuluan undang-undang No 18 tahun 2009 tentang larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Larasita merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak dengan mekanisme sistem jemput bola.

Transparansi pemerintah dalam pelaksanaan program sertifikat tanah dapat dilihat dari pelayanan lebih dekat, biaya, kinerja pelayanan bentuk pelayanan dan proses lebih cepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaskanaan layanan rakyat untuk sertifikat tanah (Larasita) dikota Makassar sudah transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indicator pelayanan dari proses penyelesaiannya, dimana penyelesaian sertifikat tidaks sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.

4. Skripsi yang berjudul “*Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 di Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar.*”, Oleh Sahwiah.<sup>8</sup>

Penelitian ini berfokus pada transparan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di SMP Negeri 1 di Kecamatan Pasimarannu Kepulauan selayar, Dengan menggunakan indicator penelitian (1)

---

<sup>8</sup>Sahwiah, *Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 di Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Makassar, Makassar, 2014.

penyediaan informasi yang jelas (2) kemudahan masyarakat mengakses informasi (3) penyusunan mekanisme pengaduan keluhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyediaan informasi yang jelas oleh pemerintah tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab belum dilakukan secara transparan. (2) kemudahan masyarakat mengakses informasi tentang pengolahan dana BOS belum terlaksana dengan baik. (3) menyusun mekanisme pengaduan keluhan masyarakat belum dilakukan secara baik. Dalam upaya meningkatkan Transparansi pengelolaan Dana BOS tersebut sangat dipengaruhi oleh factor pendukung yaitu pengawasan internal, eksternal dan adanya fasilitas yang memadai sedangkan factor penghambat yang kurangnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Dana BOS dan pencairan Dana BOS yang terlambat.

5. Skripsi yang berjudul *“pengaruh akuntabilitas, Transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di kabupaten Bone”*, Oleh Resky Mulya Anugriani.<sup>9</sup>

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas Transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintahan kabupaten Bone. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan yaitu: 1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, dimana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai

---

<sup>9</sup>Resky Mulya Anugriani, *pengaruh akuntabilitas, Transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di kabupaten Bone*, kripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.



tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang di anggarkan 3. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Pengawasan itu sendiri merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manegirial, dengan membandingkan pelaksanaan yang nyata dan pelaksanaan yang di rencanakan. 4. Berdasarkan hasil analisis korelasi ganda dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang cukup kuat antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Kajian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Pada penelitian ini penulis berfokus pada transparansi pengelolaan anggaran tentang pembinaan remaja di Kelurahan Samata. Selain itu penelitian ini menggunakan konsep demokrasi dimana transparansi salah satu pilar good governance dalam mewujudkan demokrasi.

## **5. Landasan Teori**

### **1. Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orng untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Pembangunan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, 2002, Hal. 18.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintahan, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebar luaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>11</sup> Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan

---

<sup>11</sup>.Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan akuntabilitas Publik Melalui Akutansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akutansi Pemerintah Vol. 2, No 1, Mei 2006, Hal 45.

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>12</sup> Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu : (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat. (2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

---

<sup>12</sup>Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Pembangunan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, 2002, Hal. 19.

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut ; (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintahdaerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholders dilibatkan secara proposional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan peraturan daerah yang accountable dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial ekonomi dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai untuk dipahami dan (untuk kemudian)

dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi dikalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban atas keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Lebih lanjut tentang transparansi dapat dilihat dari lampiran 2, termasuk indikator maupun alat ukur dari prinsip ini, tetapi secara ringkas dapat disebutkan

bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pernyataan-pernyataan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelepasan maupun penyebaran informasi maupun penyimpanan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya membuat pemerintah bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.<sup>13</sup>

**Herbert McClosky** berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian

---

<sup>13</sup> Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Desa puguh Kecamatan Bajo Kabupaten Kendal* (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2010). Hal.13.



dalam proses pemilihan penguasa secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.<sup>14</sup>

**Kevin R. Hardwick**, partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintahan dan terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

**Norman H. Nie** dan **Sidney Verba** berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang di teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

**Michael Rush** dan **Philip Althoff**, partisipasi adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Indikatornya adalah berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.

**Samuel Huntington** dan **Joan M. Nelson** berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi

---

<sup>14</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hal.367.

bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>15</sup>

Dasar dari partisipasi politik adalah konsep kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat berpartisipasi untuk menentukan tujuan di masa depan suatu negara, menyalurkan aspirasi mereka dan bisa mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Jadi yang dimaksud partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Adapun Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik telah dianggap sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik; ada yang menyoroti faktor-faktor dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Arnstein S.R. melihat, partisipasi politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Lebih rinci Arnstein menjelaskan faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Sedangkan Frank Lindenfold mengemukakan bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfold menemukan bahwa status

---

<sup>15</sup> Efriza, *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Jakarta: Alfabeta, 2012). Hal. 155.

ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi.<sup>16</sup>

Weimar menyebutkan, paling tidak ada lima faktor berikut yang mempengaruhi partisipasi politik yakni:

- a. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa, dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk ikut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini, misalnya kaum buruh, para pedagang, dan para profesional.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru yang pada gilirannya akan memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.

---

<sup>16</sup> Efriza, *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Jakarta: Alfabeta, 2012). Hal 193.

- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini, sering kali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam memengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.<sup>17</sup>

Adapun menurut Milbrath dalam Maran (2007) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana didalam faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

---

<sup>17</sup> Efriza, *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Jakarta: Alfabeta, 2012). Hal 198.

Lima faktor utama yang mendorong masyarakat berpartisipasi politik, antara lain :

1. *Sejauh mana orang menerima perangsang politik.* Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal maupun informal.
2. *Faktor karakteristik pribadi seseorang.* Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
3. *Karakteristik sosial.* Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
4. *Situasi atau lingkungan politik itu sendiri.* Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal

dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

5. *Pendidikan Politik*. Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.<sup>18</sup>

Selain faktor pendukung, Milbrath juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain :

1. Kebijakan Induk organisasi selalu berubah. Maksud dari kebijakan induk selalu berubah ini, organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.
2. Pemilih pemula yang Otonom. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.
3. Dukungan yang kurang dari induk untuk mensukseskan. Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi dengan induk organisasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan.

---

<sup>18</sup>Rafael RagaMaran, *Pengantar Sosiologi Politik*(Jakarta:Asdi Mahasatya 2007). Hal.156.



Berdasarkan pendapat diatas dalam partisipasi politik terdapat juga faktor penghambat yang dapat membuat seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan kegiatan politik. Dengan tiga faktor itu seseorang bias menjadi tidak berpartisipasi politik dalam kegiatan politik seperti pemilu.<sup>19</sup>

### 3. Teori Demokrasi

Pemerintahan demokrasi telah berkembang dari Yunani Kuno, dengan perdebatan-perdebatan saat itu oleh kalangan tokoh-tokoh filsuf diantaranya.<sup>20</sup> Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinus, Polybius, Cicero. Socrates memiliki gagasan tentang bentuk pemerintahan (Negara) yang dicita-citakannya, yaitu negara demokrasi, yang menyatakan bahwa negara yang dicita-citakannya tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi negara berkeadilan bagi warga masyarakat (umum).<sup>21</sup> Perkembangan pemerintahan demokrasi dalam suatu negara lebih lanjut mempengaruhi pemikiran Plato.

Menurut pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, mengelompokkan pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan yang dicita-citakan dan pemerintahan yang korup. Perbedaan yang lain terletak pada penggunaan criteria masing-masing dengan menggunakan indicator kualitatif dan kuantitatif. Pemerintahan demokrasi menurut Plato menganut pada indicator pemerintahan kualitatif yaitu pada kualitas pendidikan dan moral pemimpin, sedangkan oleh Aristoteles berdasarkan

---

<sup>19</sup> Agus Muslim, *Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur*, (Jakarta Barat, Sebuah Skripsi, 2013). Hal 7-8.

<sup>20</sup> Juanda H, op.cit, Hal. 54

<sup>21</sup> Syahrin Basah, 1992, *Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, PT Citra Adya Bhakti, Bandung, Hal. 86.

pada jumlah orang yang memimpin dan untuk kepentingan beberapa orang.<sup>22</sup>

Henri B. Mayo dalam Miriam Budiardjo menyebutkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

*“bahwa sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik”*

Sistem demokrasi menurut pandangan Henry B. Mayo dalam miriam Budiardjo bahwa, bahwa sebagai sistem politik, tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral dan beberapa nilai, yang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Demokrasi dalam kerangka pemerintahan daerah dan desentralisasi dari sejak dulu oleh para pendiri negara Indonesia antara lain Muhammad Hatta dan Soepomo, meletakkan dasar kedaulatan Rakyat sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Muhammad Hatta disebutkan bahwa dasar kedaulatan

---

<sup>22</sup>Plato dan Aristoteles dalam Syachran Basah, *Ibid*, Hal. 56-57.

<sup>23</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, Hal. 61.

<sup>24</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, Hal. 62-63.

rakyat, yakni hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa, dan di daerah. Tiap-tiap golongan persekutuan itu mempunyai badan perwakilan sendiri seperti Gementeraad, Provinciale raad.<sup>25</sup>

Menurut pendapat Soepomo yang tidak berbeda dengan Muhammad Hatta bahwa, Soepomo menuntut agar politik pembangunan negara Indonesia disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bentuk negara Indonesia harus diungkapkan “semangat kebatinan bangsa Indonesia”, yaitu hasrat akan persatuan, maka ia secara konsekuen mendukung desentralisasi.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi yang terbentuk dari asas desentralisasi mengarahkan kepentingan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri dalam mengurus pada hak dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokrasi. Pemerintahan daerah yang demokrasi terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam menentukan pemimpin di daerah serta mengawasi jalannya kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemerintahan demokrasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : daerah, luas dan warga negara yang banyak jumlahnya, urusan yang begitu kompleks dan berbelit-belit oleh karena itu pemerintahan demokrasi sekarang ini, yang benar-benar ikut aktif dalam pemerintahan bukanlah rakyat atau warga negara itu sendiri, melainkan adalah wakil-wakil rakyat, yang

---

<sup>25</sup>Mohammad Hatta, 1976, *Kearah Indonesia Merdeka, Dalam Karangan jilid I*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 103.

<sup>26</sup>Franz Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 13-14.

terkumpul dalam suatu kesatuan, yang disebut dewan perwakilan rakyat. Dengan catatan bahwa wakil-wakil rakyat itu didalam ikut serta aktif didalam memikirkan jalanya pemerintahan, harus benar-benar membawa suara rakyat, kehendak rakyat, harus mencerminkan kemauan rakyat, jadi pokoknya badan perwakilan rakyat itu harus bersifat representative. Oleh karena itulah kita menyebutnya pemerintah perwakilan rakyat yang representative.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas, undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka pemerintahan daerah adanya dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Sehingga demokrasi berhubungan dalam desentralisasi dan otonomi daerah harus di implementasikan pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang berasaskan otonomi dan desentralisasi, maka kepala daerah sebagai pemimpin daerah yang dipilih secara berpasangan dengan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis, dimana kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah merupakan hasil dari suatu proses pemilihan langsung dari rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga dihasilkan kepala daerah yang demokratis, legitimate dan bertanggung jawab terhadap rakyat pemilih dalam suatu daerah, serta sebagai unsure pemerintahan daerah bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, diharapkan mampu melaksanakan pemerintahan di daerah yang demokratis, dengan mengikut sertakan partisipasi warga masyarakat, mampu menyerat aspirasi masyarakat, dan menerima masukan-masukan yang

---

<sup>27</sup>Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 242

konstruktif dari masyarakat di daerah serta memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat daerah.

Hubungan antara desentralisasi dan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sendi-sendi yang menumbuhkan kebanggaan aspirasi masyarakat, menindak lanjuti pengaduan masyarakat serta memberikan ruang gerak pemerintahan daerah sendiri dalam perumusan kebijaksanaan daerah, penyusunan program-program pemerintahan daerah yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta terselenggaranya organisasi pemerintahan daerah yang terpelihara dan dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan daerah.

#### **4. *Good governance***

Untuk mewujudkan *good governance* dalam konteks otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi *sector public* perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sector swasta. Selain reformasi kelembagaan reformasi manajemen publik,

untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama terkait dengan sistem pengelolaan pemerintah daerah<sup>28</sup>

Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya di pergunakan untuk membangun, tetapi juga untuk menggunakan integrasi, kohesi dan kesejahteraan rakyat. dengan demikian bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat, secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yakni<sup>29</sup>:

- a. nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kamus bahasa Indonesia *good governance* di terjemahkan sebagai tata pemerintah yang baik, namun ada yang menerjemahkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik. di samping itu, arti yang lain *good*

---

<sup>28</sup> Alwi Hasyim Batubara, *Konsep Good Governence Dalam Konsep Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari-april 2006, Hal. 5.

<sup>29</sup> Hartuti, *Transparansi Penyaluran Raskin di Kelurahan Pattingaloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar hal 9

governance sebagai pemerintah yang amanah. Jika *good governance* di terjemahkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat di defenisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintah.<sup>30</sup>

Lembaga administrasi negara mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Peraturan pemerintah dalam 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

*Good governance* di laksanakan agar kinerja pemerintahan daerah lebih terarah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang menandai guna mencapai hasil yang lebih baik dan terciptanya struktur pemerintahan yang ideal yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, *good governance* berorientasi pada :orientasi ideal, negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada

---

<sup>30</sup>Hartuti, *Transparansi Penyaluran Raskin di Kelurahan Pattingaloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar hal 10

demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya.pemerintahan yang berfungsi secara ideal,secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetisi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta demokratis berfungsi secara efektif dan efisien sehingga unsur-unsur dalam pemerintahan(*governance stakeholders*) dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu.<sup>31</sup>

#### 1.Pemerintahan(negara)

Negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan,tetapi lebih jauh dan melibatkan pula sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

#### 2.Sektor swasta

Pelaku sector swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri,pengolahan perdagangan,perbankan dan koperasi dan koperasi sector informal.

#### 3.Masyarakat madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau tengah-tengah antara pemerintah,mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi sosial politik dan ekonomi.

---

<sup>31</sup>Hartuti, *Transparansi Penyaluran Raskin di Kelurahan Pattingaloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar hal 11



## 2. Prinsip *good governance*

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintah yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah di kurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan LSM/organisasi non pemerintah) semakin di tingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Rencana strategi lembaga administrasi negara tahun 2000-2004, di sebutkan perlunya pendekatan baru dalam mengembangkan negara dan pembangunan agar terarah dan terwujudnya pemerintahan yang baik yakni “proses pengelolaan pemerintah demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, supaya berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi, dan peningkatan daya saing bangsa”.

UNDP mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip pada pelaksanaan *good governance* meliputi.<sup>32</sup>

Partisipasi (*participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan berasosial dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif aturan hukum (*rule of law*), kerangka aturan hukum dan perundang-

---

<sup>32</sup>Hartuti, *Transparansi Penyaluran Raskin di Kelurahan Pattingaloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar hal 14

undangan dan berkeadilan dan di laksanakan secara utuh, terutama tentang hak asasi manusia.

Transparansi (*transparancy*), transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat di peroleh oleh mereka yang membutuhkan. Daya tanggap (*responsiveness*), setiap institusi atau lembaga-lembaga public dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Keadilan(*equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Efektivitas dan efesiensi (*efficiency and effectiveness*), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia serta pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara sumber daya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).

Akuntabilitas (*accountability*), para pengambil keputusan dalam organisasi publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

## **6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.<sup>33</sup> Dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana Transparasi Alokasi dana APBD di kelurahan Samata dalam Program Pembinaan Remaja. Penulisan deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamtan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penulisan deskriptif Kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar- benar terjadi pada suatu tempat.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu data yang bersumber dari studi lapangan (Field Research) studi lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai objek yang diteliti
- b. Data sekunder adalah yang bersumber dari kepustakaan (Library Research)

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penulisan

---

<sup>33</sup>Bogdan dan Taylor, *Dalam Lexy J. Meleong, Metode peneltian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung, 1991, hal, 31.

yang akan diperoleh nantinya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Metode Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, hidung, lidah dan kulit.
- b. Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, terkait dengan Transparansi Anggaran Dana Kelurahan Samata pada pengelolaan dana Remaja di kelurahan Samata Kabupaten gowa , penulis akan mewawancarai perwakilan pada instansi:
  - i. Lurah Samata
  - ii. Pegawai Kelurahan Samata
  - iii. Tokoh Masyarakat
  - iv. Masyarakat (Kelompok Remaja)
- c. Metode Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Alat ini untuk pengumpulan data melalui *Camera* maupun *Handphone*. Berguna mengumpulkan data bagi penulis di lapangan.

#### **4. *Analisis data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan misalnya untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai Politik Transparansi Anggaran Dana Kelurahan Samata Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu. Sehingga metode ini digunakan penulis untuk mengamati secara kritis. Fenomena yang terjadi sehingga peneliti akan mendapat gambaran yang jelas tentang transparansi anggaran pembinaan remaja di Kelurahan Samata

#### **5. *Sistematika Penulisan***

- BAB I membahas tentang pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan metode penelitian.
- BAB II berisi tentang gambaran umum dari lokasi penelitian di Kelurahan Samata.
- BAB III berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang membahas Transaparansi Alokasi dana APBD di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa dalam Program Pembinaan Remaja.
- BAB IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran penulis.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GOWA

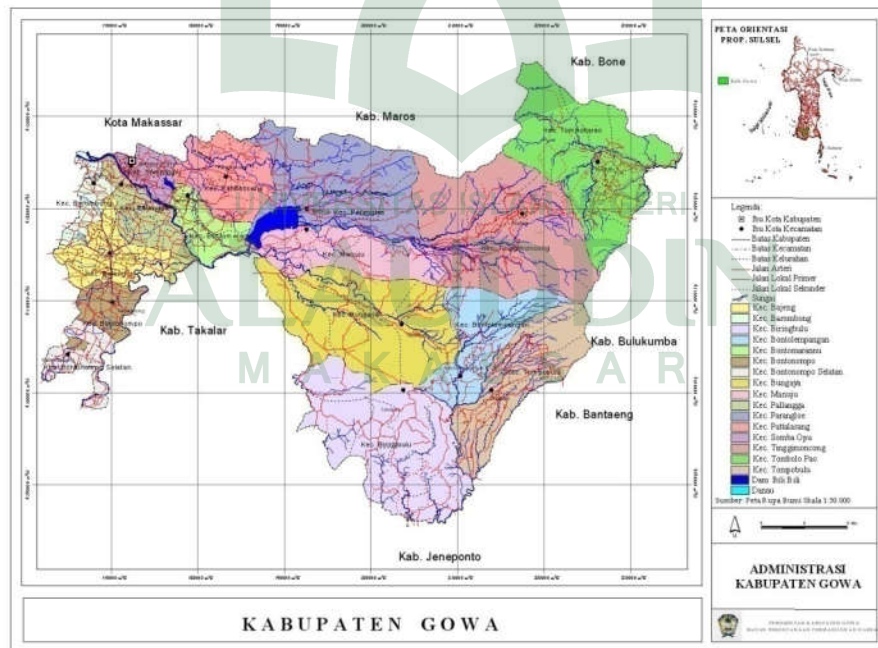
##### 1.1. Letak Geografis

**Kabupaten Gowa** berada pada  $119,3773^{\circ}$  Bujur Barat dan  $120,0317^{\circ}$  Bujur Timur serta  $5,0829342862^{\circ}$  Lintang Utara dan  $5,577305437^{\circ}$  Lintang Selatan dimana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas wilayah  $1.883,33 \text{ km}^2$ , atau setara dengan  $3,01\%$  dari luas Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas  $1.509,87 \text{ km}^2$  atau setara dengan  $80,17\%$  yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas  $373,46 \text{ km}^2$  atau setara dengan  $19,83\%$  yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bonto Marannu dan Pattalassang.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallasang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonombo dan Bontonombo Selatan.<sup>34</sup>



<sup>34</sup><http://www.gowakab.go.id> (Diakses pada tanggal 10 April 2015, pukul 15:30 wita)

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 1**  
**Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota Kabupaten (Km)	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	Thd Luas Kabupaten (%)
1	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
<b>JUMLAH</b>				<b>1.883,33</b>	<b>100</b>

Sumber : <http://www.gowakab.go.id>

Secara umum Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan temperatur 27,125° celcius dimana dapat ditemui daerah beriklim basah dan kering, dengan ketinggian 5 – 1300 meter diatas permukaan laut.

### **1.2. Jumlah Penduduk**

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2014 tercatat sebanyak 691.309 jiwa yang terdiri dari 339.575 jiwa atau 49,12% penduduk laki- laki dan 351.734 jiwa atau 50,87% penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki- laki. Angka

perbandingan penduduk laki- laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 97, ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki- laki. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak- anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,71 %, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 60,29% dan penduduk usia lanjut terdapat 7,99% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa rata- rata laju pertumbuhan sebesar 2,68% pertahun.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa tahun 2009-2013.**

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki	Perempuan	Jumlah	
Bontonompo	19.924	21.680	41.604	92
Bontonompo Sel	14.429	15.716	30.145	92
Bajeng	32.574	33.423	65.997	97
Bajeng Barat	11.834	12.431	24.265	95
Pallangga	51.530	52.993	104.523	97
Barombong	18.031	18.524	36.555	97
Somba Opu	68.396	69.544	137.942	98
Bontomarannu	16.401	16.685	33.086	98
Pattalassang	11.515	11.651	23.166	99
Parangloe	8.571	8.967	17.538	96
Manuju	7.248	7.673	14.921	94
Tinggimoncong	11.637	11.801	23.438	99
Tombolo Pao	14.445	14.009	28.454	103
Parigi	6.585	7.274	13.859	91
Bungaya	8.142	8.636	16.778	94
Bontolempangan	6.768	7.348	14.116	92
Tompobulu	14.817	15.857	30.674	93
Biringbulu	16.728	17.522	34.248	96
Jumlah	339.575	351.734	691.309	97
total	329.673	340.792	670.485	97
	324.021	335.492	659.513	97
	320.793	332.148	352.941	97
	305.202	312.115	617.317	98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa

### 1.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Gowa

Tingkat pendidikan Kabupaten Gowa tercatat pada tahun 2014 sebanyak 134.506 jiwa yang terdiri dari 71.363 jiwa atau 53,05% Laki- laki dan 63.143 jiwa atau 46,95% penduduk perempuan yang tidak/Belum tamat SD. Untuk tingkat pendidikan SD/MI sebanyak 128.254 jiwa yang terdiri dari 58.184 jiwa atau 45,37% Laki- laki dan 70.070 Jiwa atau 54,63 % perempuan telah tamat SD/MI. Sebanyak 80.059 jiwa yang terdiri dari 42.234 jiwa atau 52,75% Laki- Laki dan 37.825 jiwa atau 47,25% perempuan telah menamatkan pendidikan SLTP/MTS/Sederajat. Sebanyak 73.214 jiwa yang terdiri dari 33.567 jiwa atau 45,84% Laki- laki dan 39.647 jiwa atau 54,16% perempuan telah menamatkan pendidikan SLTA/MA/Sederajat. Untuk penduduk yang tamat SMK sebanyak 22.330 jiwa yang terdiri dari 14.289 jiwa atau 64% Laki- laki dan 8.041 jiwa atau 36% perempuan. Sedang untuk tingkat pendidikan DIPLOMA I/II dari 4.601 jiwa terdiri dari 1.483 jiwa atau 32,24% Laki- laki dan 3.118 jiwa atau 67,76%. Sebanyak 5.723 jiwa yang terdiri dari 2.646 jiwa atau 46,23% Laki- laki dan sebanyak 3.077 jiwa atau 53,77% telah menempuh jenjang pendidikan DIPLOMA III/ Sarjana Muda. Sedangkan untuk jenjang pendidikan DIPLOMA IV/S-1, S-2, S-3 sebanyak 22.736 jiwa yang terdiri dari 11.432 jiwa atau 50,28% Laki- laki dan 11.304 jiwa atau 49,72% perempuan. Dari penjelasan tersebut dilihat kalo jumlah penduduk Kabupaten Gowa paling banyak hanya sampe menamatkan pendidikan di tingkat SD/MI.

**Tabel III**

**Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Gowa tahun 2009-2012**

Pendidikan yang ditamatkan	Laki- Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Total <i>Total</i>
Tidak/ Belum Tamat SD	71.363	63.143	134.506
SD/MI	58.184	70.070	128.254
SLTP/MTS/Sederajat	42.234	37.825	80.059
SLTA/MA/Sederajat	33.567	39.647	73.214
SMK	14.289	8.041	22.330
DIPLOMA I/II	1.483	3.118	4.601
DIPLOMA III/SARJANA MUDA	2.646	3.077	5.723
DIPLOMA IV/S-1,S-2, S-3	11.432	11.331	22.736
Jumlah/ <i>Total</i>			
2012	253.198	236.252	471.450
2011	241.466	251.797	493.263
2010	254.799	268.177	522.976
2009	242.727	250.285	493.012

## 2. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SOMBA OPU

### a. Sejarah Kecamatan Somba Opu

1. Distrik Tombolo (wilayah Somba Opu, Pa'baeng-baeng, Tamalate, Barombong)
2. Pembentukan DATI II Gowa (UU No.29 thn 1959)
3. Pemerintah Kecamatan Tamalate DATI II Gowa (dengan wilayah administrasi sampai ke Pa'baeng-baeng, Tamalate dan Barombong)

4. Perluasan Ibukota Propinsi Daerah Tk.I Sulselra dan penetapan batas wilayah Kodya Ujung Pandang, Kab.Gowa, Maros dan Pangkep (PP No.51 Tahun 1971)
5. Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. (Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1992).

**Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1992**

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Somba Opu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang meliputi wilayah:
  - a. Sebagian wilayah Kecamatan Tamalete yang merupakan sisa pengembangan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang meliputi:
    1. Kelurahan Sungguminasa;
    2. Kelurahan Katangka;
    3. Kelurahan Samata.
  - b. Sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu yang meliputi :  
  
Kelurahan Tamarunang.

- (2) Wilayah Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Somba Opu maka wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

**b. Profil dan Keadaan Geografis Kecamatan Somba Opu**

Kecamatan Somba Opu salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si yang merupakan Camat yang kesepuluh.<sup>35</sup>

Kecamatan Somba Opu merupakan satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa yang letaknya berada di Ibukota Kabupaten dan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Luas Kecamatan Somba Opu adalah 28,09 Km<sup>2</sup> atau 2.809 Ha.

Kecamatan Somba Opu berada pada wilayah dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah dengan koordinat geografis berada pada 5 derajat 12'5" LS dan 119 derajat 27'15" BT. Batas alam dengan kecamatan Palangga adalah sungai Jeneberang yaitu sungai

---

<sup>35</sup> Kantor Kecamatan Somba Opu, Profil dan Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu

dengan panjang 90 Km dan luas daerah aliran sungai 881 Km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Somba Opu, sebagai berikut<sup>36</sup>

- Sebelah Utara : Kota Makassar
- Sebelah Barat : Kota Makassar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga (sungai Jeneberang)
- Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Bontomarannu

Terbagi dalam wilayah administrasi, masing-masing yaitu :

1. 14 Kelurahan, yaitu :

a. Kelurahan Sungguminasa	luas	1,46 Km <sup>2</sup>
b. Kelurahan Bonto-bontoa	luas	1,61 Km <sup>2</sup>
c. Kelurahan Batangkaluku	luas	1,30 Km <sup>2</sup>
d. Kelurahan Tompobalang	luas	1,80 Km <sup>2</sup>
e. Kelurahan Katangka	luas	1,36 Km <sup>2</sup>
f. Kelurahan Pandang-pandang	luas	1,55 Km <sup>2</sup>
g. Kelurahan Tombolo	luas	2,06 Km <sup>2</sup>
h. Kelurahan Kalegowa	luas	1,21 Km <sup>2</sup>
i. Kelurahan Samata	luas	2,44 Km <sup>2</sup>
j. Kelurahan Romang Polong	luas	3,71 Km <sup>2</sup>
k. Kelurahan Paccinongang	luas	2,32 Km <sup>2</sup>
l. Kelurahan Tamarunang	luas	2,16 Km <sup>2</sup>
m. Kelurahan Bontoramba	luas	2,20 Km <sup>2</sup>
n. Kelurahan Mawang	luas	2,99 Km <sup>2</sup>

<sup>36</sup> Kantor Kecamatan Somba Opu, Profil dan Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu

TOTAL

LUAS 28,09 Km<sup>2</sup>

2. 28 Lingkungan, yaitu :

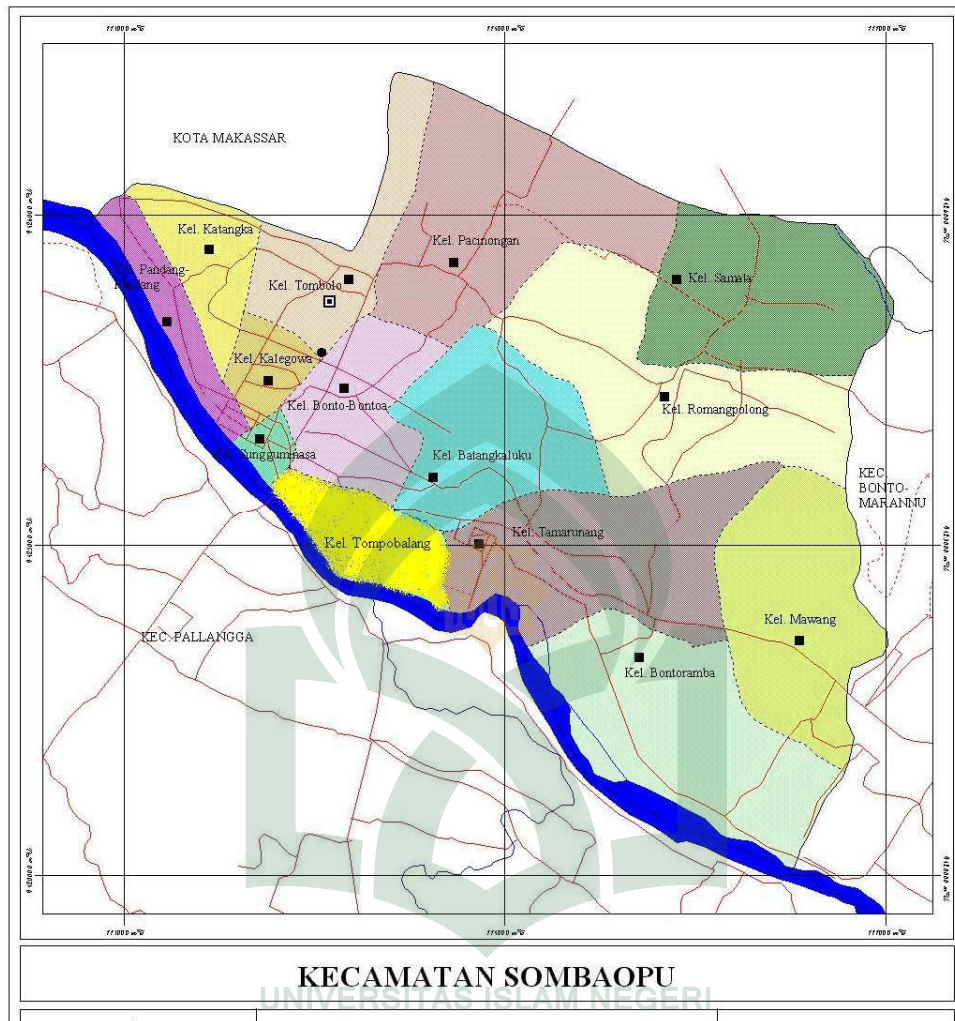
- |                |               |                  |                 |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| - Lambasele    | - Je'neberang | - Hasanuddin     | - Pao-pao       |
| - Sungguminasa | - Lakiyung    | - Tamalate       | - Panggentungan |
| - Bonto-bontoa | - Katangka    | - Samata         | - Beroanging    |
| - Bontokamase  | - Pandang 2   | - Borong Raukang | - Galoggoro     |
| - Batangkaluku | - Mangasa     | - R. Polong      | - Bontobaddo    |
| - Karetappa    | - Tombolo     | - Garaganti      | - Biring Balang |
| - Cambaya      | - Pa'bangiang | - Pacinongang    | - Buttadidi     |

3. 118 RW

4. 389 RT







### c. Jumlah Penduduk

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu sebesar 137.942 Jiwa atau 19,95 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan dengan penduduk terbesar di Kabupaten Gowa dan juga dengan laju pertumbuhan penduduk terbanyak yakni sebesar 6,91%. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

**Tabel VI**

**Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Somba Opu tahun 2009- 2013**

Kelurahan	Jumlah penduduk					Laju Pertumbuhan penduduk per tahun 2009-2013
	2009	2010	2011	2012	2013	
Pandang- Pandang	5.528	7.278	7.302	7.423	7.654	6,72
Sungguminasa	7.115	7.263	7.321	7.443	7.674	1,52
Tompobalang	7.761	10.379	10.487	10.661	10.992	7,21
Batangkaluku	10.296	13.061	13.207	13.426	13.843	6,10
Tamarunang	8.329	12.952	13.150	13.396	13.785	10,60
Bontoramba	3.418	3.457	3.492	3.550	3.660	1,38
Mawang	2.993	4.073	4.104	4.172	4.302	7,53
Romangpolong	5.177	6.542	6.611	6.721	6.930	6,01
Bonto- Bontoa	8.478	12.053	12.221	12.424	12.810	8,61
Kalegowa	2.277	2.395	2.418	2.458	2.534	2,16
Katangka	7.406	9.339	9.512	9.670	9.971	6,13
Tombolo	9.367	14.475	14.475	14.608	15.313	10,33
Paccinongang	15.927	19.878	19.878	20.434	21.069	5,76
Samata	4.687	4.687	6.981	7.182	7.405	9,58
	98.799	130.287	131.598	133.784	137.942	6,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2014.

Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.911 orang/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK.

**Tabel VII****Kepadatan Penduduk di Kecamatan Somba Opu tahun 2011- 2013**

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Orang)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Orang/km <sup>2</sup> )
Pandang- Pandang	7.654	2,16	3.544
Sungguminasa	7.674	1,46	5.256
Tompobalang	10.992	1,80	6.107
Batangkaluku	13.843	1,30	10.648
Tamarunang	13.785	2,16	6.382
Bontoramba	3.660	2,12	1.726
Mawang	4.302	2,99	1.439
Romangpolong	6.930	2,71	2.557
Bonto- Bontoa	12.810	1,61	7.957
Kalegowa	2.534	1,21	2.094
Katangka	9.971	1,36	7.332
Tombolo	15.313	2,06	7.433
Paccinongang	21.069	3,71	5.679
Samata	7.405	1,44	5.142
Jumlah 2013	137.942	28,09	4.911
2012	133.784	28,09	4.763
2011	131.598	28,09	4.685

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2014

**d. Kondisi Sosial dan Budaya**

Somba Opu selain sebagai kecamatan Ibukota juga dikenal sebagai daerah yang memiliki adat istiadat yang kental karena memiliki banyak situs dan tempat-tempat bersejarah. Di Kecamatan Somba Opu terdapat Istana Balla' Lompoa peninggalan kerajaan Gowa. Di kota ini pula terletak makam Sultan Gowa yaitu Sultan Hasanuddindan leluhur serta penerus-penerusnya. Selain itu terdapat pula makam Syekh Yusuf yang terkenal hingga Madagaskar, India dan Afrika Selatan, juga makam Arung Palakka dari kerajaan Bone.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2014

Masjid pertama di Sulawesi Selatan yang dibangun pada sekitar tahun 1600 Masehi juga terdapat di kota ini, tidak jauh dari makam Syekh Yusuf dan makam raja-raja Gowa dan Arung Palakka. Di tengah kecamatan juga mengalir sungai Jeneberang yang hulunya mulai dari gunung Lompobattang di kota wisata Malino dan bermuara keselatan Makassar melalui kota Makassar di bagian selatan di sisi benteng Somba Opu yang dahulu merupakan benteng pertahanan raja-raja Gowa.<sup>38</sup>

Pada zaman pembangunan sekarang ini, pendidikan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan pola pikir serta pengetahuan masyarakat untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia sekolah yang terus meningkat dari tahun ketahun, maka penyediaan sarana fisik pendidikan juga harus ditingkatkan, seperti gedung sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kecamatan Somba Opu sebagai bagian dari Kabupaten Gowa juga menjalankan program Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang dicanangkan oleh Bupati terpilih Ichsan Yasin Limpo.

Adapun rincian sarana pendidikan di Kecamatan Somba Opu (menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa) adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Jumlah sekolah taman kanak-kanak sebanyak 41 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 163 orang dan dengan jumlah murid sebanyak 2.327 orang.
- b. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 44 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 14 sekolah, sekolah

---

<sup>38</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2014

<sup>39</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2014

inpres sebanyak 29 sekolah, dan sekolah swasta sebanyak 1 sekolah.

Adapun jumlah guru adalah sebanyak 1.152 orang.

- c. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu sebanyak 1 sekolah, jumlah guru sebanyak 18 orang dengan jumlah murid sebanyak 103 orang.
  - d. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 2 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 12 orang dan jumlah siswa sebanyak 174 orang.
  - d. Jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 17 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 6 sekolah, dan swasta sebanyak 11 sekolah.
  - e. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 96 orang dengan jumlah murid sebanyak 837 orang.
  - f. Jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 10 sekolah dengan rincian berdasarkan status yaitu 2 buah sekolah negeri dan 8 buah sekolah swasta dengan jumlah guru sebanyak 250 orang.
  - g. Jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 100 orang dan jumlah murid sebanyak 675 orang.
  - h. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 8 sekolah dengan rincian berdasarkan status yaitu 2 buah sekolah negeri dan 6 buah sekolah swasta dengan
  - i. Jumlah guru sebanyak 280 orang dan jumlah murid sebanyak 1.930 orang.
- Adapun di bidang keagamaan terdapat beberapa tempat ibadah dengan rincian berdasarkan jenisnya yaitu:

1. Masjid : 107 buah

2. Mushollah : 16 buah
3. Langgar : 16 buah
4. Gereja : 7 buah

Adapun jumlah rohaniawan Islam adalah:

1. Ulama : 6 orang
2. Khatib : 168 orang
3. Mubaligh : 93 orang
4. Penyuluh Agama Muda : 13 orang
5. Penyuluh Agama Madya : 7 orang
- 6.

## 1.1. GAMBARAN UMUM KELURAHAN SAMATA

### 1.1.1. Letak dan Geografis

Kelurahan Samata adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang letaknya berada di ujung selatan kecamatan somba Opu. Serta berbatasan dengan Kota Makassar yaitu ibukota Sulawesi Selatan dan jarak dari jantung Kabupaten Gowa sejauh 5 km. Adapun luas Kelurahan Samata adalah 510 HA, adapun batas-batas wilayah Kelurahan Samata sebagai berikut:

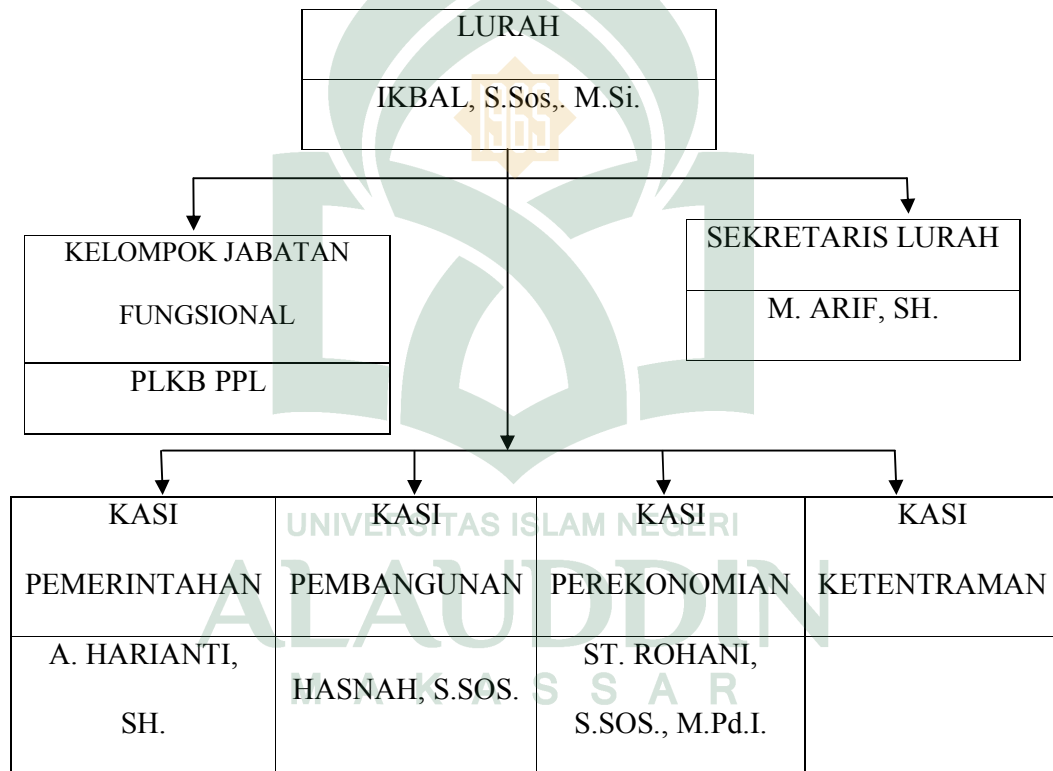
- Sebelah Utara : perbatasan dengan Kota Makassar
- Sebelah Timur : perbatasan dengan Desa Sunggumanai
- Sebelah Selatan : perbatasan dengan Kelurahan Romang Polong
- Sebelah Barat : perbatasan dengan Kota Makassar

Kelurahan Samata berada pada wilayah dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada daratan rendah dengan koordinat geografis berada pada 5 derajat 13'5" LS 121 derajat 28'18" BT.

### STRUKTUR ORGANISASI

#### PEMERINTAH KELURAHAN SAMATA

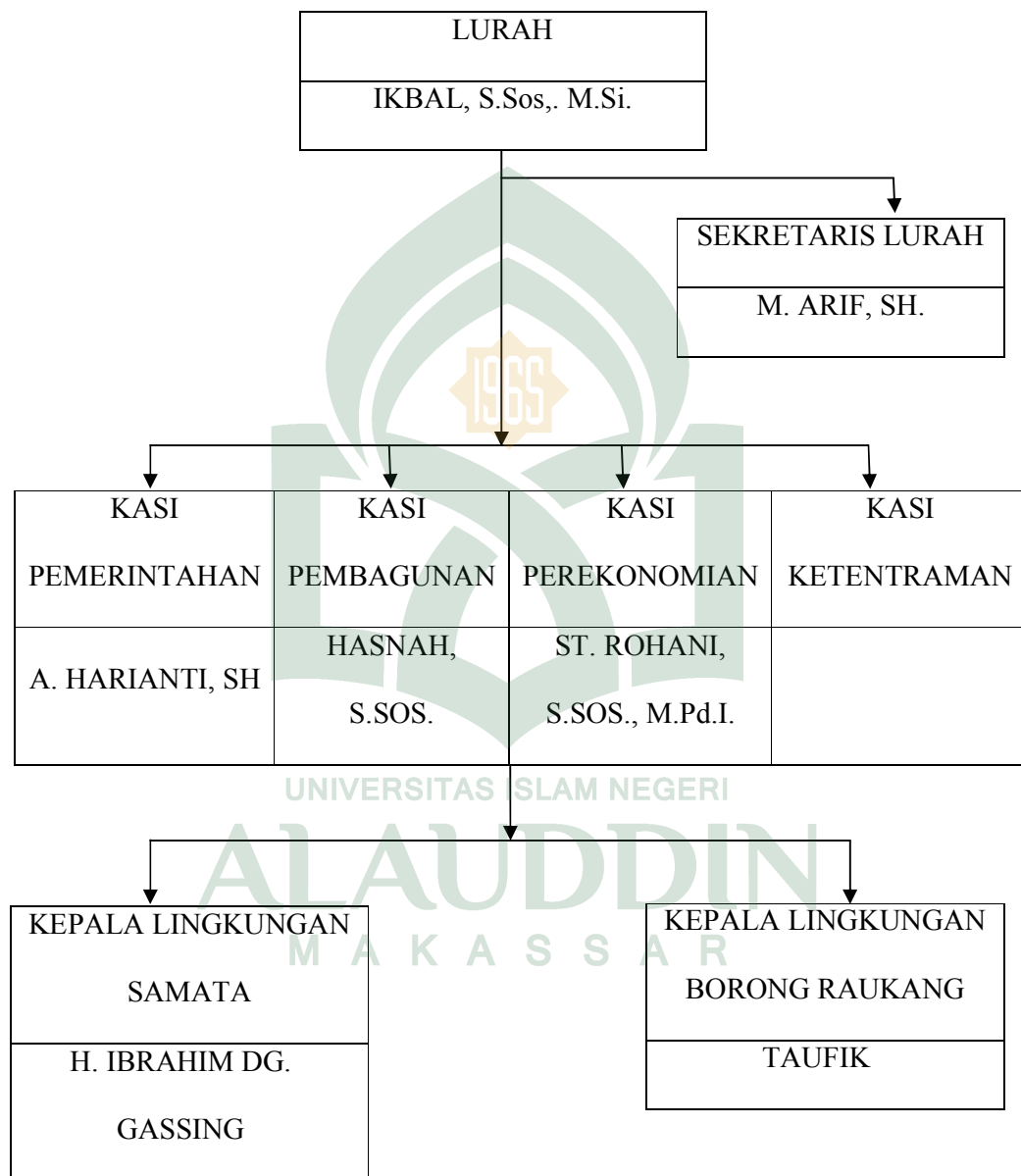
KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA



STRUKTUR ORGANISASI

PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT

KEL. SAMATA KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA





### 1.1.2. Penduduk

Pada sensus penduduk tahun 2014, jumlah penduduk di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah 8.140 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.120 jiwa dan perempuan 4.070 jiwa. Kelurahan Samata tercatat tergolong tinggi kepadatan penduduknya, laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Samata adalah 1,10 persen dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2116 Kepala keluarga.

### 1.1.3. Pendidikan

Berdasarkan data pendidikan di Kelurahan Samata dapat dilihat bahwa kepala keluarga mayoritas berpendidikan terakhir SD/Sederajat. Untuk kepala keluarga laki-laki sebesar 31,27 % berpendidikan terakhir SD/Sederajat dari kepala keluarga perempuan sebesar 28,34 % berpendidikan terakhir SD/Sederajat secara kasar dapat digambarkan bahwa keluarga yang dikepalai oleh perempuan mempunyai kualitas sosial, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih rendah dari pada keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bagaimana Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?**

Transparansi merupakan jaminan akses informasi, serta adanya kemudahan akses informasi dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Banyak hal yang bisa dilakukan para remaja di Kelurahan Samata untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti :

1. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi.
2. Mengadakan kegiatan Kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap Minggu pagi.
3. Mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama.
4. Mengadakan lomba hal hal positif.
5. Setiap tahun diadakan acara wisata.

Dan masih banyak lagi, bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan senang hati semua hal sederhana itu bisa sangat menyenangkan, karena dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu apabila para pemuda pemudi dapat melakukan kegiatan remaja yang baik dan tepat, akan

membantu pemerintah dalam memajukan dan menata kondisi lingkungan dan mental rakyat Indonesia khususnya di Kelurahan Samata ke arah yang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir apa yang harus kita lakukan untuk hal yang berguna. Kegiatan ini bermanfaat pula untuk melatih agar sifat individualistis tidak tertanam kuat, karena kalau hal itu sudah tertanam kuat akan mengakibatkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri, kegiatan ini tak kalah menyenangkan jika dapat menyikapi secara tepat.

بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ حَكْمَتَ وَإِنْ

*Artinya: "dan apabila kamu memberi keputusan, hendaklah kamu memutuskan de-ngan adil".*

Indikator-indikator transparansi adalah sebagai berikut: (1) penyediaan informasi tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana, (2) kemudahan masyarakat mengakses informasi.<sup>40</sup>

Demikian halnya transparansi pengelolaan dana Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa akan dideskripsikan melalui beberapa indikator di atas:

a. Minimnya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan remaja Kelurahan Samata.

---

<sup>40</sup> Dra. Loina Lalolo Krina P, *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi*, Jurnal, sekretariat *good public governance* badan perencanaan pembangunan nasional, Jakarta, 2003. Hal. 17.

Penyediaan informasi adalah sebuah wujud layanan dari salah satu bentuk transparansi dengan indikator; penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. Tujuan utama program dana Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah untuk mengakses kegiatan/program kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam pengelolaan dana Kelurahan Samata ini membutuhkan informasi dari pemerintah terkait program, agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>41</sup>

Menurut hasil wawancara dengan anggota DPRD tentang penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur pengelolaan dana Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

*“Dana anggaran yang disalurkan ke desa atau kelurahan tidak semerta-merta di anggar. Kita melihat dulu berdasarkan luas wilayah dan usulan desa masing-masing berapa dana yang dibutuhkan sehingga kita membuat pansus (panitia khusus) terlebih dahulu. Serta kita ada namanya reses (akses komunikasi) sehingga kita turun ke masyarakat untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat, melihat dan mendengar apa maunya rakyat, kemudian ada namanya skala kualitas sehingga kita bisa pertimbangkan dana dari APBD yg dikeluarkan.”<sup>42</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menggambarkan bahwa penyediaan informasi tentang prosedur-prosedur yang jelas karena sesuai bentuk peraturan yang dilakukan Kelurahan Samata ke DPRD untuk menyampaikan inspirasi-inspirasi untuk dana kekelurahan untuk permohonan akan disesuaikan

---

<sup>41</sup>Hartuti, *Transparansi Penyaluran Raskin di Kelurahan Pattingaloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar hal 55

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ahmad Tombong, 54 Tahun, (Ketua Komisi II) wawancara pada tanggal 5 September 2016, pukul 10:00 wita.

dengan luas wilayah serta pertimbangan dari APBD untuk ke dana pembinaan remaja Kelurahan Samata.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat tentang penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur pengelolaan dana Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

Hasil wawancara penulis dengan selaku pengurus remaja di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

*“Selama ini dalam pengelolaan dana kegiatan remaja dikelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan indikator penyediaan informasi yang jelas terhadap masyarakat tentang prosedur-prosedur pengelolaan dana belum memuaskan karena keterlibatan para pemerhati remaja belum sepenuhnya terlibat dalam membahas berapa anggaran yang teralokasikan dari pemerintah pusat kekelurahan untuk kegiatan ini.”<sup>43</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menggambarkan bahwa penyediaan informasi tentang prosedur-prosedur yang jelas belum dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi karena tidak dilakukan secara transparan untuk semua kalangan mengenai khususnya informasi tentang prosedur-prosedur pengelolaan dana remaja Kelurahan Samaata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa .

Biaya-biaya merupakan rencana keuangan priodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam suatu monitor untuk jangka waktu tertentu. Untuk

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Fandy 27 Tahun(Ketua Remaja) wawancara pada tanggal 25Desember 2015, pukul 15:00 wita.

mewujudkan transparansi pengelolaan dana remaja Kelurahan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berikut ini hasil wawancara penulis dengan atlet olahraga sepak takraw di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

*“Kalau untuk biaya kebutuhan yang diperlukan untuk pembenahan kegiatan kami terutama untuk suatu kegiatan remaja memang kami tidak mengeluarkan biaya, tetapi terkadang untuk melakukan suatu kegiatan kami diluar pihak kelurahan terkadang membebangkan biaya untuk kami, dan kami tidak pernah diundang dalam pembicaraan mengenai anggaran yang teralokasikan dari Kecamatan kekelurahan Samata”.*<sup>44</sup>

Hasil wawancara dengan atlet sepak bola di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya dana dari pemerintahan di kelurahan Samata Kabupaten Gowa kami dapat melaksanakan/mengadakan suatu perlombaan atau turnamen bertempat dibakung kegiatan ini kami agendakan kegiatan remaja dalam turnamen bakung cup II, itupun dana yang kami dapatkan tidak banyak dan kami berharap bahwa dana untuk kegiatan remaja harus benar-benar lebih besar karena di kegiatan remaja bukan hanya cabang olahraga sepak bola, akan tetapi adapula cabang olahraga sepak takraw, seni, dan remaja masjid, namun saya selaku pengurus kegiatan remaja khususnya sepak bola tidak pernah dilibatkan mengenai pembicaraan berapa anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah pusat akan tetapi berdasarkan anggaran dana untuk kegiatan remaja di kelurahan Samata Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu kami mendapatkan informasi dan hasil pembicaraan langsung dengan kepala lurah samata di kantor samata dana untuk anggaran remaja sebesar 2.000.000 untuk semua cabang agenda kegiatan remaja baik kegiatan didalam maupun diluar”.*<sup>45</sup> (wawancara dg ronrong 25-desember-2015)

Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

*“Dengan saat ini adanya anggaran dana di kelurahan Samata Kecamatan somba opu Kabupaten Gowa khususnya untuk kegiatan remaja sudah terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin, kami sebagai masyarakat merasa bangga*

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Dulla25 Tahun, (Atlet Takraw) wawancara pada tanggal 25Desember 2015, pukul 17:00 wita.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Dg Ronrong 30Tahun, (Atlet Sepak Bola) wawancara pada tanggal 25Desember 2015, pukul 18:0 wita.

*memiliki remaja-remaja yang sudah mau berpartisipasi dan terlibat dalam suatu kegiatan-kegiatan yang baik serta bisa menjadi contoh dan teladan kepada adik-adiknya dan berharap agar generasi ini tidak hilang dan kami berharap kepada remaja-remaja kami agar bisa berpartisipasi dalam bidang olahraga, seni, dan kegiatan remaja masjid".<sup>46</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan informasi tentang anggaran dana kegiatan remaja di kelurahan samata kabupaten gowa kecamatan somba opu belum transparan, karena sebagian para pengurus kegiatan remaja masih mengeluh dengan terbatasnya anggaran untuk kegiatan remaja di kelurahan samata kabupaten gowa kecamatan somba opu, maka itu dari pihak masyarakat mengharapkan agar kegiatan remaja mendapatkan perhatian yang lebih khususnya kepala kelurahan samata untuk lebih transparan dalam membicarakan dan lebih mensosialisasikan anggaran dana yang teralokasikan dari kecamatan kekelurahan agar masyarakat tidak mencurigai anggaran untuk agenda kerja di kelurahan samata.

Tanggung jawab merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana yang alokasikan di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, guna mengetahui tanggung jawab Kelurahan Samata dalam melaksanakan tugas-tugas anggaran dana yang di alokasikan pemerintah ke Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sehingga tujuan akan terlaksana dengan baik dan disertai dan tanggung jawab akan tugasnya masing-masing.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Dg Tayang35 Tahun, (Ketua RT) wawancara pada tanggal 25Desember 2015, pukul 19:00 wita.

Menurut hasil wawancara dengan anggota DPRD tentang penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur pengelolaan dana Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

*“Salah satu tugas utamanya adalah pengawasan, pengawasan ini meliputi semua kebijakan pemerintah daerah termasuk kebijakan pengalokasian anggaran desa/kelurahan. Bukan hanya DPRD saja tetapi semua unsur elemen masyarakat mengawasi dana yang dikeluarkan pemerintah daerah, apakah sesuai prosedurnya dan tepat sasaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Jadi semua anggota DPRD harus representasi dari bawah ke atas sehingga terjalin komunikasi dengan baik, serta kita di DPRD sudah mengeluarkan perda transparansi.”<sup>47</sup>*

berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa informasi prosedur-prosedur pengelolaan dana Kelurahan Samata disini diawasi oleh setiap elemen baik masyarakat, Kelurahan serta DPRD. Sehingga komunikasi terjalin dengan baik.

Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah mengatakan bahwa:

*“Selain kepala Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa penanggung jawab pengelolaan anggaran dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat, dan kepala Kelurahan Samata mengirim surat atau bentuk proposal sesuai dengan isi agenda yang akan dikerjakan dikelurahan samata kabupaten gowa ke pemerintah pusat untuk didesposisi, anggaran yang keluar dari kecamatan sebesar 200.000.000.00 yang dimana agenda kerja dalam pengoperasional perkantoran berjumlah keseluruhan sebesar 79.899.000, pemeliharaan kelurahan berjumlah keseluruhan sebesar 62.891.000, bidang pembinaan 33.210.000, penyusutan operasional 5.000.000 dan 19.000.000 untuk pembinaan”.<sup>48</sup>*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan H. Rate, 40 Tahun, (Sekretaris Komisi II) wawancara pada tanggal 5 September 2016, pukul 10:00 wita.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ikbalsos (Kepala Kelurahan) wawancara pada tanggal 1 Januari 2015, pukul 09:00 wita.



Hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Kelurahan Samata Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

*“Dalam pengelolaan dana yang telah dialokasikan ke Kelurahan Samata Kabupaten Gowa kami melihat dalam tanggung jawab sudah dilakukan secara transparan, karena sejauh ini proses berjalanya kegiatan remaja dikelurahan Samata ini kami melibatkan kepada pemuda yang terutama dalam bidang olahraga, seni, dan keibadaan. untuk anggaran dalam agenda kerja remaja dikelurahan samata ini memiliki anggaran 2.000.000 yang dimana meliputi beberapa agenda kerja termasuk salah satu cabang olahraga, adapula agenda cabang lainnya seperti cabang sepak takraw yang diadakan setiap tahunan di Samata dengan anggaran hadiah total keseluruhan 1.500.000 dan dana untuk kegiatan seni, dan juga musik ini belum mendapatkan apapun kecuali para pemuda menyediakan alatnya sendiri dan begitu pula untuk remaja masjid”.<sup>49</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban anggaran dana yang telah dialokasikan anggaran dana Kelurahan Samata Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu dari pemerintah pusat telah dilakukan secara transparan terhadap pemerintah kelurahan samata, tapi belum transparan kepada masyarakat.

b. Minimnya kemudahan akses informasi tentang pengelolaan dana pembinaan remaja.

Akses informasi memberikan kemudahan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk mencari, memberikan dan menerima informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempedulikan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Taufik (Kepala Lingkungan Garaganti) wawancara pada tanggal 1 Januari 2015, pukul 16:00 wita.

batas negara.transparansi pelayanan publik dikelurahan samata kabupaten gowa kecamatan somba opu.

Penyelenggaraan pelayan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan good governance (pemerintah yang baik). Transparansi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dan dimengerti oleh penerima kebutuhan pelayanan dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jasa.

Kemudahan masyarakat dalam akses informasi, mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu informasi yang dapat dilakukan dengan langsung berhadapan dengan pihak terkait dengan penggunaan informasi yang didapatkan melalui berhubungan langsung dengan kepala Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kurang dalam mendapatkan akses informasi pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung karena pengelolaan anggaran dana kegiatan remaja harus bertemu langsung dengan kepala kelurahan samata kecamatan somba opu kabupaten gowa untuk

mendapatkan informasi dan dibutuhkan surat resmi untuk dapat mengetahuinya. Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tentang kemudahan akses informasi yang jelas tentang pengelolaan dana kegiatan remaja menyatakan bahwa:

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat dikelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

*“Satu-satunya cara untuk mengakses informasi tentang pengelolaan dana kegiatan remaja dengan menemui langsung kepala Kelurahan Samata karena dimana anggaran untuk kelurahan bersifat lebih tertutup kecuali masyarakat ingin tahu langsung dapat menemui kepala kelurahan dengan wawancara dan bertanya langsung di ruangan kantor lurah, diantaranya informasi anggaran kegiatan remaja yang bebas diketahui oleh kalangan warga masyarakat misalnya berapa anggaran untuk keseluruhan dalam bidang-bidang kegiatan remaja”.*<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa salah satu untuk mengakses informasi tentang pengelolaan anggaran dana kegiatan remaja yang ada dikelurahan samata yaitu tidak terbuka untuk umum walaupun bertemu dengan Kepala kelurahan haruspun membawa surat resmi bukan hanya itu walaupun dengan surat resmi data yang diberikanpun sangat terbatas dengan alasan rahasia negara padahal soal pengelolaan dana menurut peneliti seharusnya dapat diakses dengan mudah untuk mengurangi dugaan penyelewengan dana. Ikbal s.sos,m.si kepala Kelurahan Samata mengatakan:

*“Untuk mendapatkan informasi mengenai Anggaran dana harus memiliki surat resmi karena bersifat rahasia dari Anggaran Pusat kalau hanya informasi*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Dg Ngola60 Tahun(Tokoh Masyarakat) wawancara pada tanggal 2 Januari 2015, pukul 10:00 wita.

*lain semisalnya program- program yang ada di kelurahan ataupun aktivitas kelurahan memang tidak membutuhkan surat resmi”.*<sup>51</sup>

Hasil wawancara menunjukkan adanya sikap tidak transparan dari kelurahan padahal seharusnya hal ini dapat di akses dengan mudah penulis membandingkan dengan Wilayah Jakarta yang jauh lebih besar dari dari ingkup Kelurahan saja soal anggaranpun dapat diakses dengan mudahnya melalui internet, sebagian masyarakatpun di Kelurahan Samata mengatakan bahwa informasi yang bertemu langsung dengan kepala Kelurahan Samata masih kurang efektif penyampaianya kepada warga masyarakat. Karena mengenai informasi secara individu dan bertemu langsung itu tidak efektif bagi kalangan masyarakat. Kalau informasi seperti ini banyak warga yang sama sekali tidak mengetahui berapa anggaran dana untuk kegiatan kerja Kelurahan Samata.

Seperti yang dikemukakan oleh warga Campagayya Kelurahan Samata mengatakan bahwa:

*“Punna kammanne informasi jai penduduk tena anggisenganki kagh tena nagh pabattu baji informasi manngengaseng rimasyarakat dikelurahan samata kagh seharusnya pammarenta kapala mangei assosialisasi anjo program jamang nagh masyarakat naissengi apa-apa anjo kegianta nagh supaya masyarakatka kulletongi terlibat anbicarakangi soal anggaran nagh kulletongi nagh bantu anjo nagh jamayya pammarentaya rikelurahan Samata artinya kalau begini informasi banyak penduduk tidak tahu karena informasi tidak sampai semua ke masyarakat di Kelurahan Samata karena seharusnya pemerintah kepala Kelurhan pergi bersosialisasi agar program kerja masyarakat bisa terlibat dalam pembicaraan soal anggaran agar bisa juga membantu program kerja pemerintah di Kelurahan Samata”.*<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ikbal s.sos (Kepala Kelurahan) wawancara pada tanggal 1 mei 2015, pukul 09:00 wita.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Dg Sikki50 Tahun, (Petani) wawancara pada tanggal 2 Januari 2015, pukul 17:00 wita.

Hasil wawancara dengan staf kelurahan samata kecamatan somba opu kabupaten gowa mengatakan bahwa:

*“Dalam pemerintahan ada informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat dan ada pula yang bersifat rahasia sesuai UU. Masalah pengelolaan anggaran dana kelurahan tidak semua kita menginformasikan ke masyarakat, tetapi kami tidak pernah menutup akses informasi ketika ada masyarakat yang ingin tahu tentang pengelolaan anggaran dana Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintahan”.*<sup>53</sup>

Beberapa informasi yang tidak diketahui masyarakat Kelurahan Samata dalam memilih mana informasi yang seharusnya bersifat rahasia dan tidak di publikasikan, dan mana informasi yang bisa dipublikasikan. Tetapi itu bukan alasan masyarakat yang berada dikelurahan samata untuk mengetahui lebih jauh. Seperti yang diungkap salah satu warga samata dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

*“Rahasia apapun anjo masyarakat erotongi naisseng karea informasi akkule diasseng nagh karea tenakulle diasseng kagh jai. Justru iyamianjo paralluki akses informasi lebih luasa supaya nagh asseng asengi masyarakatka. Artinya rahasia apapun itu masyarakat juga harus tahu mana informasi yang bisa diketahui dan mana yang tidak. Maka dari itu perlunya akses informasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui semuanya”.*<sup>54</sup>

Hasil wawancara penulis dengan makmur mengatakan bahwa:

*“Salah satu cara menyampaikan informasi yang lebih baik yaitu Kepala Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, perlu bersosialisasi dengan masyarakat. Jangan hanya masyarakat yang bisa mengakses informasi dengan bertemu langsung dengan kepala kelurahan. Menurut saya hal yang*

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan ST. Rohani. S, Sos. M.pd.I35 Tahun, (Staf Kelurahan) wawancara pada tanggal 1 Januari 2015, pukul 11:00 wita.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hendra24 Tahun, (Masyarakat) wawancara pada tanggal 3 Januari 2016, pukul 09:00 wita.

*seperti itu kurang efektif dan lambat untuk mendapatkan informasi untuk masyarakat”.*<sup>55</sup>

Wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa dalam kurangnya akses informasi belum dapat dilaksanakan secara transparan, sebab masih ada informasi yang belum dapat dijelaskan secara terbuka. Tentang transparansi pengelolaan dana anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk Kelurahan Samata.

#### **B. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?**

Menyusun suatu mekanisme penggunaan adalah salah satu prinsip dari transparansi pengelolaan anggaran dana APBD dengan indikator pelayanan pengaduan dan jaminan hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan menemukan bahwa dalam transparansi pengelolaan anggaran dana Kelurahan Samata menggunakan suatu indikator, yaitu pelayanan pengaduan dan jaminan hukum. Sesuai dengan UU NO.25/2009 tentang pelayanan publik merupakan terobosan besar dalam mencoba untuk meningkatkan transparansi dalam memberikan pelayanan publik.

Cara untuk menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya media bagi masyarakat dalam menyampaikan pangaduan kalau ada keluhan tentang pengelolaan dana anggaran Kelurahan Samata.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat dikelurahan Samata mengatakan bahwa:

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Makmur22 Tahun, (Mahasiswa) wawancara pada tanggal 3 Januari 2016, pukul 11:00 wita.

*“Melalui telepon atau sms merupakan sarana yang ada di Kantor Lurah Samata yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memasukkan kritik dan saranya kepada Kantor Lurah Samata secara tidak langsung”.<sup>56</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengaduan melalui telepon dan sms yang disediakan kantor Lurah Samata dapat memudahkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara member kritik dan saran terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan samata secara tidak langsung, tetapi masyarakat yang berada di kelurahan samata jarang ada yang memasukkan saran dan kritiknya meskipun sudah ada telepon ataupun sms yang disediakan di kantor Lurah Samata.

Hasil wawancara dengan masyarakat Campagayya Kelurahan Samata mengatakan bahwa:

*“Selama masa jabatan kepala Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa saya rasa melakukan langkah-langkah pertanggung jawaban dengan cara-cara terbuka salah satunya adalah layanan pengaduan melalui telepon atau sms dapat disampaikan langsung kepada kepala kelurahan dengan adanya nomor telepon kita bisa terhubung salah satu staf Kelurahan Samata. yang bisa dihubungi selama 8 jam”.<sup>57</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan pengaduan di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun terkait layanan telepon seluler untuk pengaduan yang langsung terhubung dengan biro terkait dan adanya telepon atau sms saran dan kritik yang disediakan, namun

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Vivi18 (Pelajar) wawancara pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 10:00 wita.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Aras 17 Tahun, (pelajar) wawancara pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 14:00 wita.

masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut karena kurang komunikasi atau sosialisasi dengan pihak Kelurahan.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa belum sesuai yang diharapkan dan belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat kurangnya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pembinaan remaja, dan adapun minimnya akses informasi tentang pengelolaan dana kegiatan remaja.

Kurangnya penyediaan informasi yang jelas menjadi penghambat remaja untuk mengetahui berapa anggaran dana yang dialokasikan untuk pembinaan ramaja kekelurahan, serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kelurahan Samata terhadap pengalokasian dana pembinaan remaja ke Masyarakat.



Adapun minimnya akses informasi anggaran dana Kelurahan Samata menjadikan Kegiatan Remaja tidak terlaksana seperti apa yang telah di agendakan dari Kelurahan Samata karena Anggaran Dana yang teralokasikan Kelurahan Remaja masih minim diketahui oleh Remaja.

## **2. IMPLIKASI**

Pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja sehingga masyarakat bisa lebih tahu anggaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya agar masyarakat tidak curiga terhadap tindak pidana korupsi di kelurahan. Jangan hanya masyarakat yang bisa mengakses informasi dengan bertemu langsung dengan kepala kelurahan. Menurut saya hal yang seperti itu kurang efektif dan lambat untuk mendapatkan informasi untuk masyarakat

Dalam kegiatan pembinaan remaja perlu adanya jalur koordinasi yang jelas dan baik antara pemerintah di Kelurahan dan masyarakat setempat, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih terhadap kepentingan pribadi serta diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan terdapat control atau pengawas oleh pemerintah setempat.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Basa, Syahrani, 1992, *Ilmu negara, Pengantar metode dan sejarah perkembangan*, Bandung, PT Citra Adya Bhakti.
- Budiardjo, Meriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Bogdan dan Taylor, 1991, Dalam *Lexy J. Meleong, Metode penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Efriza, 2012, *Political explorer (sebuah kajian ilmu politik)*, Jakarta: Alfabeta.
- Gatara, A.A Sahid, 2009, *Ilmu Politik*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hatta, Mohammad, 1976, *Kearifan Indonesia merdeka, Dalam karangan jilid I*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Maran, Rafael Raga, 2007, *Pengantar sosiologi politik*, Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Suseno, Franz Magnis, 1995, *Mencari sosok demokrasi, sebuah telaah filosofis*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
- Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.

### Skripsi

- Anugriani, Resky Mulia, 2014, *Pengaruh akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep alue for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNHAS, Makassar.
- Dani, Wahyu Rahma, 2009, *Partisipasi politik pemilih pemula dalam dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Bajo Kabupaten Tenggall*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Fadli Risman, 2014, *Transparansi pemerintah dalam pelaksanaan program pelayanan sertifikat tanah di kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Unismuh Makassar, Makassar.
- Hartuti, 2015, *Transparansi penyaluran Raskin di Kelurahan Pattinggaloan Baru Kecamatan Tanah Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unismuh Makassar, Makassar.
- Irawati T, 2013, *Transparansi pelayanan publik di Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Unismuh Makassar, Makassar.
- M. Sarifuddin, 2009, *Hubungan kenakalan remaja dengan fungsi sosial keluarga*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin program studi sosial agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Muslin, Agus, 2013, *Faktor-faktor partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Jakarta Barat*, skripsi.
- Sahwiah, 2014, *Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 di Kecamatan Pasimarannu kepulauan Selayar*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Unismuh Makassar, Makassar.

## Jurnal

- Buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah, badan pembangunan perencanaan nasional dan departemen dalam negeri, 2002.
- Batubara, Alwi Hasyim, 2006, *Konsep Good Governence dalam konsep otonomi daerah*, jurnal analisis administrasi dan kebijakan.

Dra. Loina Lalolo Krina P , *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi*, Jurnal, sekretariat *good public governance* badan perencanaan pembangunan nasional, Jakarta, 2003.

Mardiasmo, 2006, *perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik : suatu sarana Good Governance*, Jurnal akuntansi pemerintah.

Surtikanti, *Pernasalahan otonomi daerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah*, majalah ilmiah UNIKOM, Jakarta.

